

RINGKASAN

Muammar Daufir Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Mengelola Minyak
237410101024 dan Gas Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun
2006 Tentang pemerintahan Aceh

(Dr. Malahayati, S.H., LL.M dan Dr. Mukhlis, S.H., M.H)

Aceh merupakan daerah yang memiliki hak atas otonomi khusus, untuk menata sendiri daerahnya dengan persetujuan pusat. Pasal 160 UUPA menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Namun pada kenyataannya masih terdapat wilayah pengelolaan migas Aceh yang tidak bisa dikelola oleh BPMA.

Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas, dan untuk menganalisis desentralisasi pengelolaan Migas Aceh saat ini.

Jenis Penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Kewenangan pemerintah Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh terdiri dari Kewenangan membentuk BPMA yang mewakili pemerintah Aceh dalam melakukan survei umum, mengelola dan memanfaatkan data survei umum, berperan dalam melaksanakan lelang wilayah kerja migas, menetapkan target produksi migas, melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, menyusun konsep Kontrak Kerja Sama (KKS), menentukan kebijakan terkait target jumlah produksi (lifting) minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, dan kewenangan pengelolaan migas tersebut hanya diberikan untuk wilayah darat dan laut sepanjang 0 sampai 12 mill dari pantai. Sedangkan untuk wilayah 12 mill sampai 200 mill dari pantai Aceh kewenangan pengelolaannya secara penuh dikelola oleh pusat, pemerintah Aceh hanya diberi kewenangan pengawasan saja untuk wilayah darat dan laut sepanjang 0 sampai 12 mill dari pantai tersebut. Desentralisasi pengelolaan migas di Aceh saat ini masih belum sesuai dengan ketentuan UUPA Pasal 160 UUPA ayat (1) juncto Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh, yaitu masih terdapatnya SKK migas yang mengelola minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan BPMA.

Disarankan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan BPMA juga ikut terlibat dalam pengelolaan migas pada wilayah laut 12 mill sampai 200 mill. Disarankan agar SKK Migas segera mengalihkan hak dan kewajiban pengelolaan migas pada wilayah darat dan laut sampai 12 mill kepada BPMA.

SUMMARY

Muammar Daufir The Authority of the Aceh Government in Managing Oil
237410101024 and Gas Reviewed from Law Number 11 of 2006
Concerning the Government of Aceh

(Dr. Malahayati, S.H., LL.M and Dr. Mukhlis, S.H., M.H)

Aceh is a region with special autonomy rights, allowing it to govern itself with central government approval. Article 160 of the UUPA states that the Government and the Aceh Government have the authority to jointly manage oil and gas resources on land and at sea in Aceh through the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA). However, in reality, there are still areas within Aceh that cannot be managed by the BPMA.

The aim of this thesis research is to determine and analyze the authority of the Aceh government in managing oil and gas, and to analyze the current decentralization of oil and gas management in Aceh.

This thesis is a normative legal research. The research approach uses a statutory approach. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this thesis are library research and document study. The data analysis used is qualitative analysis.

Based on the research results, the Aceh government's authority in managing oil and gas in Aceh consists of the authority to form BPMA which represents the Aceh government in conducting general surveys, managing and utilizing general survey data, playing a role in implementing oil and gas work area auctions, setting oil and gas production targets, implementing, controlling, and supervising upstream business activity cooperation contracts, drafting Cooperation Contract (KKS), determining policies related to oil and gas (oil and gas) production (lifting) targets, and the authority to manage oil and gas is only given to land and sea areas along 0 to 12 miles from the coast. While for areas 12 miles to 200 miles from the coast of Aceh, the management authority is fully managed by the center, the Aceh government is only given supervisory authority for land and sea areas along 0 to 12 miles from the coast. Decentralization of oil and gas management in Aceh is currently still not in accordance with the provisions of UUPA Article 160 UUPA paragraph (1) in conjunction with Article 90 of Government Regulation Number 23 of 2015 concerning Joint Management of Oil and Gas Natural Resources in Aceh, namely that there is still the SKK Migas which manages oil and gas in the area of authority of BPMA..

It is recommended that the central government grant the BPMA authority to participate in oil and gas management in the maritime zone between 12 and 200 miles. It is recommended that the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) immediately transfer the rights and obligations for oil and gas management in the onshore and offshore zones up to 12 miles to the BPMA.